



Journal of Politics and Policy Volume 3, Number 2, Juni 2021

Analysis Of Public Policy On The Management Of The Covid-19 Outbreak In Indonesia

Analisis Kebijakan Publik Mengenai Penanganan Wabah Covid-19 Di Indonesia

Wisnu Wardhana, Mutiara Kejora Timur

Universitas Muhammadiyah Malang
Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia

dhanawisnu287@gmail.com ; kejoramutiara12@gmail.com

Abstract

This article discusses the efforts of the Indonesian government in dealing with cases of Coronavirus 19 (COVID-19) transmission. By understanding the government's efforts, measures, and policies formulated and implemented, the processing strategy can be evaluated. To analyze this, a deliberative policy analysis method is used, namely analyzing the narrative and arguments of the authorities in charge of understanding the implementation of decisions and policies, the writing of this article adopts a qualitative method, namely the descriptive analysis method. The data collection technology used is library research using books, journal articles, newspapers, online news, and websites of authoritative organizations. The important findings of this article are, first, the negative narrative and the slow response of the government to the spread of COVID-19. The narrative conveyed by political elites before COVID-19 entered Indonesia did not have a sense of crisis and would not threaten the speed of decision making. Second, there is weak coordination among stakeholders, especially between the central government and local governments. This coordinated synchronization results in unstable coronavirus control. Third, citizens are indifferent or disobedient to government calls. As a result, efforts to deal with it stopped because they did not receive support from the wider community. The combination of these three factors complicates the government's efforts to control the spread of COVID-19 in Indonesia.

Keywords: Covid-19, Policy, Government

Abstrak

Artikel ini membahas tentang upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus penularan Coronavirus 19 (COVID-19). Dengan memahami upaya pemerintah, langkah dan kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan, maka strategi pengolahannya dapat dievaluasi. Untuk menganalisis hal tersebut, maka digunakan metode analisis kebijakan yang bersifat deliberatif, yaitu menganalisis narasi dan argumen otoritas yang berwenang untuk memahami pelaksanaan keputusan dan kebijakan, penulisan artikel ini mengadopsi metode kualitatif yaitu metode analisis deskriptif. Teknologi pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan buku, artikel jurnal, surat kabar, berita online, dan website organisasi otoritatif. Temuan penting artikel ini adalah, pertama, narasi negatif dan lambannya respons pemerintah terhadap penyebaran COVID-19. Narasi yang disampaikan oleh para elit politik sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia sama sekali tidak memiliki *sense of crisis* dan tidak akan mengancam kecepatan pengambilan keputusan. Kedua, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, terutama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Asinkronisasi terkoordinasi ini menyebabkan pengendalian virus korona yang tidak stabil. Ketiga, warga negara acuh tak acuh atau tidak patuh dengan imbauan pemerintah. Dampaknya, upaya penanganannya terhenti karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat luas. Kombinasi ketiga faktor tersebut mempersulit upaya pemerintah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Kata Kunci : Covid-19, Kebijakan, Pemerintah

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, dasar kebijakan publik adalah menyelesaikan masalah praktis yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat dikatakan sebagai ilmu terapan yang dapat menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, kebijakan publik dan pengambil keputusan harus memiliki orientasi kepentingan publik yang kuat (Islamy, 2009), yang disebut “semangat publik” (*public spirit*). Dalam kesempatan yang sama, (Putra, 2001) mengemukakan bahwa kebijakan publik harus berkaitan erat dengan konsep demokrasi. Tanpa hubungan ini, kebijakan publik tidak dapat meminggirkan kepentingan publik itu sendiri. Ini juga menjadi alat bagi kekuatan yang ada di suatu negara untuk merusak dan memanipulasi perilaku untuk keuntungan beberapa orang.

Secara konseptual terlihat jelas bahwa kebijakan publik harus memiliki sisi yang kuat dalam kepentingan masyarakat dan berorientasi pada kepentingan tersebut atau mampu mengakomodir kepentingan publik. Namun untuk menentukan apa yang menjadi kepentingan publik sangatlah rumit dan membutuhkan penelitian yang mendalam. Tentunya, kepentingan publik yang dimaksud adalah proses untuk menarik kepentingan semua aspek masyarakat. Mengenai kepentingan masyarakat tekini, kita pasti tentu saja langsung meilirik mengenai wabah covid-19 yang menjadi keresahan utama yang dirasakan masyarakat Indonesia.

Sejak Januari 2020, *Coronavirus Disease 19* (COVID-19) telah menginfeksi lebih dari 2.245.872 orang di seluruh dunia (WHO, 2020). Lebih dari 152.000 orang telah dipastikan meninggal akibat

virus ini (WHO, 2020). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para pemimpin pemerintahan di banyak negara berusaha memberantas epidemi COVID-19 dengan caranya sendiri. Misalnya di China, pemerintah telah merespon epidemi Covid-19 dengan menyediakan fasilitas medis khusus untuk pasien virus corona, mengubah *gimnasium*, sekolah dan hotel menjadi rumah sakit sementara, serta melakukan *rapid test* atau rantai *polimerase* untuk banyak virus. Reaksi (PCR) warga, menerapkan metode mengisolasi kota (*locking*) (Aida, 2020a: 1-2). Di Daegu, Korea Selatan, deteksi dini dilakukan melalui tes cepat, dengan tujuan menemukan individu yang terpapar Covid-19 untuk pekerjaan preventif meminimalkan penyebaran virus corona, membubarkan sekolah dan kampus, dan menerapkan *lockdown* (Park, 2020).

Secara global ada lebih dari 55 juta kasus COVID-19 yang sudah dilaporkan dimana hitungan kasus terbaru dalam bahasa Inggris bisa ditemukan di situs web organisasi kesehatan dunia serta pencegahan dan pengendalian penyakit Eropa. Sejak ditemukan laporan pertama kali kasus dari Wuhan, dimana sebuah kota yang berada di Provinsi Hubei China pada akhir tahun 2019. kasus telah dilaporkan di semua benua, kecuali Antartika. Jumlah kasus yang dilaporkan meremehkan beban keseluruhan COVID-19, karena hanya sebagian kecil dari infeksi akut yang didiagnosis dan dilaporkan. Survei seroprevalensi di Amerika Serikat dan Eropa menunjukkan bahwa setelah memperhitungkan potensi positif atau negatif palsu, tingkat paparan sebelumnya terhadap SARS-CoV-2, seperti yang ditunjukkan oleh seropositif, melebihi insiden kasus yang dilaporkan sekitar 10 kali lipat atau lebih (Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19, 2020).

Adapun Transmisi pemahaman sebuah risiko transmisi tidak lengkap dikarenakan investigasi epidemiologi di Wuhan pada awal wabah melakukan identifikasi hubungan awal dengan pasar makanan laut yang menjual hewan hidup dimana sebagian besar pasien pernah bekerja atau berkunjung dan saat wabah berlanjut, penyebaran dari orang ke orang menjadi cara utama dalam penularannya. Dimana penularannya ialah dari individu ke individu lain ialah cara utama penularan pernapasan akut *coronavirus 2* (Sars-COV-2) diperkirakan terjadi kontak jarak dekat yaitu melalui tetesan pernapasan seperti batuk, bersin, atau berbicara sehingga dapat menginfeksi orang lain jika terhirup atau melakukan kontak langsung. Namun SARS-CoV-2 juga mampu ditularkan dalam jarak yang lebih jauh melalui rute udara namun sejauh ini cara penularannya masih menjadi kontroversial (Aida, 2020).

Di Indonesia sendiri, Terhitung sudah delapan bulan sejak kasus pasien ke-1 virus corona (Covid-19) ada di Indonesia. Banyak hal telah diupayakan pemerintah untuk menanggulangi virus

ini, salah satunya adalah *work from home*, juga ada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah yang menjadi zona merah. Covid-19 yang melanda Indonesia ini sangat berdampak pada berbagai sektor, salah satunya adalah sektor kuliner. Di tengah pandemi ini, kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi produk terutama makanan dan minuman berubah drastis. Sebuah survei dari MarkPlus Inc. terhadap 110 responden membuktikan bahwa kesetiaan konsumen terhadap sebuah merek menurun hingga 75,7%. "Orang memprioritaskan *availability*, *food safety*, dan *hygiene* daripada brand. Kalau tidak ada brand yang biasa dibeli tanpa berpikir lagi karena *availability*. Demikian juga brand yang tidak memperhatikan *food safety* dan *hygiene* akan langsung di-shifting oleh konsumen. Dan ini menjadi kesempatan bagi new comer," kata Adhi dalam MarkPlus Industry Roundtable, Selasa (19/5/2020).

Indonesia sendiri merupakan negara terpadat keempat di dunia yang tidak responsif dan salah tentunya akan mengancam jutaan rakyat Indonesia. Ini terlihat jelas, misalnya pada Januari 2020 dan Februari 2020, virus melumpuhkan China, Korea Selatan, Italia dan beberapa kota lainnya. Beberapa negara telah mengadopsi kebijakan untuk menutup migrasi lintas batas. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan lain yang bertujuan untuk menarik wisatawan dan bisnis dari negara-negara yang saat ini menutup pariwisata mereka (Sari, 2020).

Pertanyaannya sekarang, mengapa kasus infeksi COVID-19 di Indonesia melonjak sangat tinggi? Apakah ada pengaruh dari kebijakan yang sulit diimplementasikan? Ataukah ada faktor lainnya? Artikel ini berasumsi bahwa melonjaknya angka kasus COVID-19 di Indonesia disebabkan oleh lambatnya respons kebijakan pemerintah, lemahnya koordinasi antar-stakeholder, dan ketidakpedulian warga atas himbauan pemerintah. Dalam rangka mengembangkan argumen-argumen guna menjelaskan asumsi di atas, artikel ini berfokus pada metode deliberative policy analysis untuk menganalisis kebijakan serta bagaimana implementasinya berdampak pada penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia merespon sangat lambat terhadap krisis dan berpotensi menjadi episentrum dunia setelah Wuhan (Sari, 2020).

Analisis Kebijakan merupakan salah satu tindakan yang dibutuhkan untuk dibuatnya sebuah kebijaksanaan, baik kebijaksanaan yang baru sama sekali ataupun kebijaksanaan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijaksanaan yang ada. Analisis kebijakan sendiri memiliki lima prosedur diantaranya yaitu seperti (Perumusan masalah, peramalan, pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi) kemungkinan juga dapat memberikan analisis mentransformasikan dari satu informasi ke informasi lainnya (Dwijowijoto, 2004). Adapun pengertian lain menurut (Dunn,

1994) analisis kebijakan merupakan salah satu metode atau teknik yang digunakan dalam studi kebijakan publik dalam rangka memberikan informasi serta alternatif pilihan bagi para formulator dalam sebuah proses pembuatan kebijakan . Dalam arti lain kompleksitas masalah publik bisa mendorong para pembuat kebijakan untuk bisa mendapatkan informasi seluas-luasnya dengan menggabungkan pengetahuan dengan realitas politik yang ada. Agar para formulator bisa menyusun kebijakan yang dapat diimplementasikan sesuai latar belakang masalah, budaya, dan juga kepentingan politik yang tidak tampak.

Menurut (Lasswell, 1971) menjelaskan bahwa studi kebijakan bukan hanya perkara teknis namun mengarah pada peran pengetahuan dalam memproses (melaksanakan dan menyusun) kebijakan. Oleh karena itu studi kebijakan disusun melampaui berbagai disiplin ilmu, baik ilmu politik, sosiologi, administrasi dan ilmu-ilmu lainnya. Namun baik studi kebijakan maupun analisis kebijakan saat ini sebagian besar gagal dalam mengambil pandangan Lasswell sehingga akibatnya analisis kebijakan dianggap kurang berhasil dalam memberikan pengetahuan berorientasi masalah atau dalam bahas sederhana gagal menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan (Bilotta, 2015). Dimana (Marsh & Smith, 2000) mengembangkan *dialectical model* yang bertujuan untuk menjelaskan secara lebih lanjut mengenai peran aktor, relasi aktor, dan kepentingannya dalam proses formulasi sebuah kebijakan yang menawarkan penjelasan tentang suatu pola hubungan timbal balik antara (i) *structure and agency* (struktur dan agensi), (ii) *network and context* (jejaring dan konteks), dan (iii) *network and outcome* (jejaring dan hasil). Hubungan dialektik ini menjelaskan hubungan yang interaktif antara dua variabel, saling mempengaruhi dan dipengaruhi secara berulang kali serta terus-menerus.

Dalam mengembangkan *policy analysis* ialah metode yang dapat digunakan dalam membahas peran argumen, retorik, dan narasi dalam proses analisis kebijakan yaitu berfokus pada empat hal yaitu, pertama, *technical-analytical discourse* yang bertujuan untuk memverifikasi efisiensi hasil program yang dijalankan termasuk efek sekunder yang tak terduga yang muncul dari program yang diimplementasikan. Kedua, *contextual discourse* yang bertujuan untuk menilai kontekstualitas atau relevansi dari suatu program dengan berbagai situasi masalah yang terkait dengan *situational validation*. Ketiga, *system discourse* yang bertujuan untuk menilai tujuan dari kebijakan mempunyai nilai instrumental atau kontributif bagi masyarakat secara keseluruhan ataupun kebijakan mengakibatkan masalah tak terduga yang berkonsekuensi terhadap masyarakat luas. Keempat, *ideological discourse* yang bertujuan untuk menyusun kembali tatanan sosial

(Fischer, 2007).

Adapun untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan penanganan wabah COVID-19, maka perlu pendekatan menurut (Marsh & Smith, 2000) dimanfaatkan dengan menggabungkan dengan pendekatan implementasi Edward III dalam (Agustino, 2020) dimana disampaikan pertama yaitu komunikasi yang mengelaborasi mengenai koordinasi antar-aktor yang konsisten dan jelas. Kedua yaitu struktur birokrasi menempatkan adanya standar pelaksanaan yang jelas mengenai berbagai hal dimana dalam hal ini protokol penanganan COVID-19). Ketiga, sumber daya yang menumpukan perhatian pada kompetensi dan kapabilitas para pelaksana, wewenang, pemanfaatan informasi serta fasilitas. Terakhir, keempat yaitu disposisi dimana yang terdiri dari insentif, pengaturan birokrasi dan sikap pelaksana. Merujuk pada kedua pendekatan tersebut, analisis kebijakan penanganan wabah COVID-19 dalam hal ini mengarah pada (i) narasi negatif dan lambannya respons pemerintah (struktur agensi, dan konteks), (ii) lemahnya koordinasi antar - *stakeholders* (komunikasi dan *network*) dan (iii) ketidakacuhan warga (konteks).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah teknik penelitian intuitif dan sistematis menghasilkan pengetahuan dengan cara efisien dan koheren. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada makna (*meanings*) dan pemahaman (*understanding*) daripada kuantifikasi, mencakup berbagai metode mulai dari wawancara untuk observasi, analisis wacana dan historis, sering disebut penelitian multi-metode. Penelitian kualitatif mempelajari fenomena dan *actor* dalam *setting* alamiah mereka, untuk memahami proses dan fenomena melalui makna para *actor* dan partisipan dalam istilah mereka sendiri.

Tujuan dari penggunaan metode penelitian ini adalah untuk yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang fenomena, aktivitas, proses sosial. Dan memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman, perspektif dan sejarah orang dalam hubungannya dengan perspektif *aktor* (responden), menggunakan metode konteks-sensitif dan semi-terstruktur, kaya data, penjelasan makna serta cara dan alasan pengajuan pertanyaan. Penelitian kualitatif mempelajari fenomena dan aktor dalam *setting* alamiah mereka, sehingga proses dan fenomena serta makna bisa difahami dalam “bahasa” atau istilah yang biasa mereka gunakan. Untuk objek nya dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Indonesia dan Masyarakat Indonesia.

Menurut KBBI data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian

untuk membuat analisis dan kesimpulan. Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk deskripsi bukan dalam bentuk angka (non-numerik) yang termasuk dalam data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum dari obyek penelitian, yang terdiri dari : Bagaimana corona virus ada, Dampaknya terhadap negara indonesia dalam kebijakan publik.

Bentuk Data berdasarkan sumber. Data berdasar sumber terbagi menjadi dua, yaitu data Primer dan Sekunder. Namun di penelitian ini, yang digunakan dalam penelitian adalah data Sekunder. Data Sekunder, dokumen yang didapat dari orang-orang yang tidak hadir di tempat kejadian, tetapi mereka menerima informasi dengan mewawancarai saksi mata atau dengan membaca dokumen primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Narasi negatif dan respon pemerintah yang lambat

Di tengah kesibukan dunia internasional dalam memprediksi penyebaran wabah virus corona, pemerintah Indonesia belum melakukan persiapan apa pun untuk merespons dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Pemerintah kerap meremehkan hal ini. Misalnya, terlihat dari pernyataan Menteri Kesehatan pada pertengahan Januari lalu bahwa “masyarakat tidak perlu panik dengan penyebaran virus corona, nikmati saja” (Satria 2020). Bersamaan dengan itu, beberapa hari kemudian, pada awal Februari lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) mengklaim bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara besar di Asia yang tidak memiliki kasus positif virus corona (cnnindonesia). Narasi-narasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia lamban dalam menanggapi pandemi COVID19 yang telah menyebar ke banyak negara saat itu. Sekaligus juga menggambarkan lemahnya ekspektasi dan daya adaptasi birokrasi pemerintah Indonesia dalam menangani masalah kesehatan. Birokrasi tidak mampu merespon perubahan kondisi kesehatan yang begitu cepat sehingga menimbulkan kekacauan di kalangan elit politik, mereka juga sebagai pengambil keputusan, dan mereka memutuskan kebijakan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terjadi. Akibatnya, dalam konteks pandemi COVID-19, dibandingkan dengan narasi positif dan eksekutif, ternyata terdapat narasi negatif.

Perilaku anti ilmiah semacam ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum memahami latar belakang wabah COVID-19 yang mematikan. Dampaknya, narasi dan pertukaran

anti-ilmiah lebih sering terjadi daripada yang mengarah pada pengembangan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah virus corona. Hal tersebut juga terlihat dari pernyataan Wapres RI yang menyebutkan bahwa salah satu penyebab virus corona tidak masuk ke Indonesia adalah karena doa ulama yang selalu membacakan doa Qunut (Maranda, 2020). Penuturan wakil presiden dan penuturan “wakil pemerintah” menunjukkan bahwa pemimpin nasional kurang memiliki sense of crisis sehingga memperlambat perumusan kebijakan strategis.

Untuk solusi terkini yang dilakukan pemerintah adalah melakukan beberapa kebijakan, kebijakan ini termasuk melarang semua penerbangan pulang pergi China; berhenti mengeluarkan visa untuk warga negara China Indonesia membatasi perjalanan ke dan dari Korea Selatan dan negara lain, Italia dan Iran; menutup sekolah, kampus, termasuk beberapa kantor pemerintah dan Perusahaan swasta; pusat hiburan tertutup. Pemerintah Indonesia berhasil meniru kebijakan negara-negara yang berhasil “meratakan kurva” yang digunakan. Kendalikan penyebaran COVID-19. Replikasi strategi dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah bentuk kebijakan pemerintah yang sensitif Ini telah dirumuskan dan diterapkan oleh negara lain dan dianggap berhasil. Sementara dari sisi kesehatan, pemerintah Indonesia menyediakan alat pelindung diri (APD), masker, obat-obatan, rekonstruksi beberapa hotel dan ruang konferensi menjadi rumah sakit khusus penanganan COVID-19. Pemerintah Indonesia juga Optimalkan pengujian COVID-19 melalui pengujian cepat dan PCR. hasil Dengan begitu, penyebaran virus korona bisa diketahui, sehingga pemerintah bisa memahami peta sebaran COVID19 melalui hasil pengujiannya.

B. Koordinasi yang buruk di antara para pemangku kepentingan

Selain masalah pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang lambat yang dapat berdampak pada implementasi COVID-19 di kemudian hari, koordinasi yang buruk antar pemangku kepentingan juga menjadi kendala dalam pengendalian penyebaran virus corona di Indonesia. Hal ini terjadi karena sistem negara kesatuan menjadikan pemerintah pusat sebagai pemangku kepentingan utama dalam bencana alam dan non bencana termasuk kesehatan.

Selain berbentuk negara kesatuan, dalam sistem politik Indonesia, Indonesia juga mengenal konsep otonomi daerah yang mensyaratkan bahwa segala urusan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, mata uang dan keuangan., dan agama. Bagi pemerintah daerah, urusan kesehatan bisa ditangani sendiri. Padahal secara konseptual, urusan kesehatan merupakan urusan rangkap yang dapat dikelola bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah / kota. Namun, ketika beberapa pemerintah daerah

melakukan tindakan aktif untuk menyampaikan informasi dan sosialisasi tentang COVID-19 (di masa awal penyebaran virus corona), pemerintah pusat mengkritik pemerintah daerah atas tindakan aktifnya.

Pada 3 Maret 2020 sehari setelah pengumuman masuknya kasus COVID-19 di Indonesia, justru juru bicara pemerintah yang menangani kasus virus corona menyatakan kepada semua pihak dimana dalam hal ini pemerintah daerah untuk menahan diri menyampaikan informasi mengenai status penularan virus corona (Nugraheny, 2020). Dimana informasi ini desentralisasi oleh pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan) sebab pemerintah daerah dianggap terlalu mendramatisasi kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pada tanggal 4 Maret lambatnya Radiogram Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 443.1/2130/SJ terkait dengan mengantisipasi pencegahan isu infeksi Novel Corona Virus (COVID-19) yang disampaikan kepada kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia yang sebenarnya sudah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri tetapi radiogram tersebut belum dapat disalurkan dikarenakan masih menunggu koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Bukan hanya itu lemahnya komunikasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (*network* yang tidak terkelola secara baik) terjadi juga di dalam pelaksanaan kebijakan isolasi wilayah (*lockdown*) di beberapa daerah. Pada pertengahan Maret 2020, pemerintah pusat memutuskan untuk tidak mengadopsi isolasi wilayah karena dapat mengganggu migrasi manusia dan akan menghambat perekonomian warga. Maka dari itu keputusannya ialah menerapkan *social* atau *physical distancing* di seluruh wilayah Indonesia namun di lima daerah (Bali, Papua, Solo, Maluku, dan Tegal) menentang kebijakn pusat dengan menerapkan *lockdown* dengan skala berbeda-beda.

Lemahnya koordinasi atau komunikasi antar- *stakeholder* dalam penanganan COVID-19 juga bisa terlihat dari adanya pembatasan lokasi pemeriksaan COVID-19 yang “hanya” di Jakarta yaitu di Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Kesehatan (Balitbang Kemenkes). Padahal ada banyak puluhan rumah sakit dan laboratorium di daerah yang bisa digunakan untuk melakukan pemeriksaan spesimen virus corona. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan ialah landasannya pada pasal 5 ayat (1) ditulis “Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyelenggarakan Kejarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan wilayah secara terpadu” padahal Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat luas sehingga dibayangkan berapa banyak waktu yang terbuang hanya untuk transportasi logistik spesimen dari daerah ke Jakarta.

Selain itu lemahnya koordinasi antarinstansi juga tampak dari lambatnya pengesahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/214/202010 tentang jejaring Laboratorium Pemeriksaan COVID-19 yang menjadi suatu dasar hukum bagi keterlibatan beberapa laboratorium di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan fungsi pemeriksaan. Padahal pemerintah sudah paham betul bahwa hanya dengan mengandalkan Balitbang Kemenkes di Jakarta adalah satu hal yang absurd. Adapun masalahnya komunikasi dan koordinasi untuk melegalkan kebersamaan beberapa laboratorium dengan Pemerintah Pusat mengalami hambatan dikarenakan Keputusan Menkes baru ditandatangani 18 hari setelah pengumuman kasus pertama di Indonesia sehingga jumlah pasien terpapar COVID-19 melonjak dari 2 kasus menjadi 367 kasus dengan 32 orang meninggal dunia yang merujuk pada lemahnya *networking* ini tidak heran apabila pemerintah dalam pengendalian COVID-19 menjadi tidak sangat optimal (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020).

Untuk solusi yang dapat dilakukan pemerintah adalah pemerintah harus dapat dengan mudah memberikan fasilitas untuk manfaat kesehatan, terutama di rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19. Atau pada kasus lain, ketika petugas kesehatan, peneliti dan perawat yang bekerja di lemari biosafety level 2 membutuhkan APD, maka polisi lalu lintas (Polantas) justru akan menggunakan APD. Jika hanya komunikasi dan koordinasi antar pihak yang berjalan lancar, maka petugas kesehatan akan lebih mudah dalam memberikan pelayanan kepada pasien tersebut.

C. Ketidakpedulian warga terhadap banding pemerintah

Masalah lain yang membuat Indonesia kurang berhasil dalam mengendalikan penyebaran virus corona adalah warganya yang acuh tak acuh (apalagi cuek) terhadap himbauan atau instruksi pemerintah. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang masih berkumpul di kedai kopi, kafe, pusat perbelanjaan, bioskop atau tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah. Padahal, sejak awal, pemerintah sudah menginstruksikan warga untuk menjaga jarak secara fisik maupun sosial demi menjaga jarak dengan orang lain. Ini akibat penyebaran virus corona, salah satunya disiram melalui air liur. Jika orang tidak menjaga jarak dan diketahui bahwa lawan bicara mereka telah terinfeksi virus atau pembawa ("carrier") virus, maka ini dapat menginfeksi orang lain dan menyebar lagi ke ketiga hingga keempat. Oleh karena itu, jarak fisik maupun sosial distance menjadi salah satu cara untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ketika sebagian besar masyarakat masih terkonsentrasi di terminal, stasiun, shelter, pasar dan tempat lain, instruksi pemerintah hanya satu arah. Warga seakan tak khawatir dengan virus ini karena lebih

memperhatikan aktivitas sehari-hari.

Sama halnya dengan *physical* atau *social distancing* himbauan pemerintah dalam menggunakan masker pun tak jarang dilanggar oleh para masyarakat luas. Ajakan mencuci tangan setelah keluar rumah pun juga tidak banyak dituruti oleh masyarakat. Pertama, ketidaktahuan warga akan bahaya sangat mematikan dari COVID-19 disebabkan lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah dan jajarannya. Pemerintah Indonesia juga tidak optimal dalam mensosialisasikan perlunya hidup bersih dan sehat diantaranya dengan mencuci tangan dan menggunakan masker dikarenakan beberapa medium dapat menjadi pemicu penyebaran virus corona. Sebagai contohnya menurut (Van Doremalem, 2020) menjelaskan bahwa virus corona dapat bertahan dalam hitungan jam hingga hari pada medium yang berbeda. Namun bagi kelas menengah yang mendapatkan informasi dari media-konvensional maupun media-sosial itu mudah diperoleh.

Kedua, adanya kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengakibatkan sebagian warga tidak peduli dengan perintah pemerintah untuk melakukan *physical* atau *social distancing* bahkan ketidakhirauan ini juga terlihat pada saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah. Dimana PSSBB adalah suatu kebijakan pemerintah pusat dalam bekerja sama dengan pemerintah daerah) dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 dengan cara membatasi kegiatan-kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terpapar infeksi. Awal-awal implementasi PSBB di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Raya dan Bandung Raya menunjukkan adanya penurunan angka migrasi manusia yang cukup signifikan. Menurut kajian (AswicaHyono, 2020) satu hal kuat yang menyebabkan warga tidak acuh dengan arahan pemerintah untuk tetap tinggal di dalam rumah (melalui PSBB) disebabkan adanya kebutuhan pokok warga dalam memenuhi kepentingan ekonomi mereka sehari-hari.

Ketiga tidak adanya sanksi yang tegas dalam membuat migrasi manusia tetap tinggi dan kebijakan *physical* atau *social distancing* menjadi kurang berdampak semisal pada acara Ijtima Jemaah Tabligh Zona Asia 2020 di kompleks Darul Ulum, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan yang sedianya akan melangsungkan acara selama empat hari mulai tanggal 19 hingga 22 Maret 2020 menjadikan salah satu contoh bagaimana sanksi tidak tegas. Adanya ribuan jemaah tabligh dari mancanegara berkumpul menjadi satu lokasi pada saat virus corona mewabah yang mengakibatkan sebaran virus menjadi tidak bisa terkendali dan para Jamaah yang pulang dari Gowa didapati terinfeksi dan sudah menularkan virus corona di lingkungan mereka masing-masing (Kurniati, 2020). Pada kasus yang lebih mikro pihak berwenang pun tak mampu memberikan

sanksi tegas terhadap para pelanggar *physical* atau *social distancing* dan PSBB sehingga orang tidak jera dengan berkumpul ataupun bermigrasi dalam wilayah ataupun antar-wilayah (Iqbal, 2020).

Adapun saran atau ide konsep manajemen yang tepat sebagai rekomendasi kepada pemerintah ialah yaitu agar larangan mudik dipatuhi yaitu pemerintah memang harus memberikan insentif kepada warga dalam berbagai bentuk. Dimana yang sangat mungkin dilakukan adalah memberikan *benefit* kepada warga yang tidak pulang kampung berupa bantuan langsung dari pemerintah dapat berupa uang tunai maupun kombinasi antara bahan kebutuhan harian dan uang tunai. Di luar itu semua juga, tentunya pemerintah tidak lagi hanya menggaungkan himbauan-himbau, tetapi harus lebih tegas dari apa yang diimplementasikan selama ini. Pemerintah juga harus berani memberi sanksi hukuman kepada warga yang tidak patuh atas imbauan atau arahan pemerintah. Sanksi tersebut juga bukan hanya membuat orang jera akan tetapi juga membuat orang bersetuju (*consent*) untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh pemerintah.

PENUTUP

Respon lambat terhadap Covid-19 ini disebabkan oleh birokrasi dan kecenderungan untuk tidak beradaptasi dengan masalah kesehatan (gelombang yang mengikuti besar) agar pemerintah dapat memprioritaskan masalah COVID-19 (pada tahap awal penularan) diabaikan yang membuat penyebaran virus corona semakin kurang terkendali.. Kedua, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan atau *stakeholder*, dalam hal ini pemerintah pusat Pemerintah daerah (di permukaan) adalah masalah klasik, tetapi selalu muncul. Masalah "otorisasi urusan" tidak menimbulkan perdebatan sengit di awal COVID-19 melanda Indonesia. Di satu sisi, lambat laun pemerintah pusat menyediakan Petunjuk terbaik untuk penanganan dan pengendalian penyebaran virus corona. di samping itu, Pemerintah daerah tanpa otoritas mengambil langkahnya sendiri secara berurutan mencegah virus ini menyebar di daerahnya masing-masing.

Penulis juga merasa keputusan untuk melibatkan laboratorium dan rumah sakit daerah sangat lambat. Demikian pula, sediakan alat pelindung diri bagi staf medis dan perawat. Akibatnya, puluhan dokter tewas saat membantu pasien yang terjangkit COVID-19. Terakhir, ketidakpedulian warga terhadap kepentingan pemerintah menjadi faktor ketiga yang menyebabkan penanganan COVID-19 di Indonesia tidak memadai. Warga enggan menggunakan masker, dan orang banyak berkumpul di kapel, kedai kopi, restoran, dan tempat-tempat (dilarang pemerintah), yang menjadi penghambat keberhasilan *social distancing*. Selain itu, diharapkan hasil dari

kebijakan ini jauh dari “kebakaran arang”, karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengandalkan mata pencaharian sehari-hari dan informal untuk mata pencahariannya sehingga banyak warga yang tidak menaati perintah pemerintah.

Kendati demikian, pemerintah Indonesia disini bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Beberapa langkah direplikasi dari negara-negara yang mampu menurunkan tingkat penyebaran virus corona seperti memberlakukan *social distancing* , menghentikan pembelajaran di kampus dan sekolah dan kampus dengan menggantinya dengan pembelajaran di rumah, meliburkan dan menutup tempat-tempat wisata, *mall*, kantor swasta, bioskop, dan tempat berkumpul lainnya., melaksanakan tes COVID-19 baik secara cepat (*rapid-test*) maupun *swab*, melaksanakan isolasi terbatas pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat infeksi tinggi dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mengubah fungsikan hotel maupun gedung-gedung pertemuan menjadi rumah sakit rujukan penanganan virus corona.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, N. R. (2020a). Rekap Perkembangan Virus Corona Wuhan Dari Waktu ke Waktu. (*Kompas Online*, 28 Januari 2020). Retrieved.
- Aida, N. R. (2020b). Pernyataan Ahli Harvard WHO hingga Kemenkes Soal Indonesia Negatif Virus Corona. (*Kompas Online*, 11 Februari 2020). Retrieved.
- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Edisi Revisi Ke-2*. Alfabeta. Bandung.
- Aswicahyono, H. (2020). *Keharusan Menekan Mobilitas Penduduk Untuk Mendatarkan Kurva Epidemiologi COVID-19 : Bukti Awal Dari Data Facebook Disease Prevention Map*. 10218(April), 1-4.
- Bilotta, G. S., Milner. A. M. & Boyd. I. L. (2015). How To Increase The Potential Policy Impact of Enviromental Science Research. *Enviromental Sciences Europe*. 27 (1), 1-6.
- Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis : An Introduction 2nd Edition*. Prentice-Hall. New Jersey.
- Dwijowijoto, R. N. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Fischer, F. (2007). *Deliberative Policy Analysis as Practical Reason : Integrating Empirical and Normative Arguments. Handbook pf Public Policy Analysis : Theory, Politics, and Methods*. 223-236. CRC Press. Boca Raton.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). *Situasi Virus Corona*. Retrieved.
- Iqbal, M. (2020). 226 Jemaat Terindikasi Positif Corona. (*CNBC Indonesia Online*. 7 April 2020). Retrieved.
- Islamy, M. I. (1997). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Kurniati, P. (2020). Sederet Fakta Penyebaran Corona Dari Klaster Ijtima Ulama Gowa. (*Kompas Online*, 20 April 2020). Retrieved.
- Lasswell, H. D. (1971). *Pre-View of Policy Science*. American Elsevier. New York.
- Maranda, S. (2020). Indonesia Terhindar Virus Corona Ma'ruf Amin : Berkah Doa Qunut. (*Tempo Online*, 27 Februari 2020). Retrieved.
- Marsh, D. & Smith, M. (2000). Understanding Policy Networks : Towards a Dialectical Approach. *Political Studies*. 48(1), 4-21.
- Nugraheny, D. E. (2020). Pihak Selain Kemenkes dan Medis Diminta Tak Umumkan Status Penularan Virus Corona. (*Kompas Online*, 3 Maret 2020). Retrieved.
- Park, S. N. (2020). Cults and Conservatives Spread Coronavirus in South Korea Seoul Seemed To

Have The Virus Under Control But Religion and Politics have derailed Plans. (*Foreign Policy Online*, 27 Februari 2020). Retrieved.

Putra, F. (2001). *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sari, H. P. (2020). Indonesia Disebut Berpotensi Jadi Episentrum Baru Covid-19 Respons Jubir Pemerintah. (*Kompas Online*, 11 April 2020). Retrieved.

Satria, J. N. (2020). Minta Masyarakat Tak Panik Soal Penyebaran Virus Corona Menkes. (*Detik Online*, 27 Januari 2020). Retrieved.

Van Doremale, N. Bushmaker, T. Morris, D.H. *et al.* (2020). Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. *The New England Journal of Medicine*. 15, 1-3.

World Health Organization (WHO). (2020). *2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) : Strategic Preparedness and Response Plan*. February, 28. Retrieved
